

BAB 2

PENDEKATAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Konflik

Definisi Konflik

Burton (1990) dalam *conflict: Resolution and Prevention* menjelaskan bahwa konflik pada dasarnya bersumber dari kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*). Hal ini dikarenakan, setiap kepentingan individu memiliki tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan maka proses penyelesaian masalahnya dapat lebih cepat dan sederhana begitu juga sebaliknya.¹ Dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan mengalami kompleksitas kebutuhan.

Susan mendefinisikan konflik sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi dan bersifat *omnipresent* (hadir dimanapun). Hal ini dikarenakan dalam hubungan antar kelompok sosial sering terdapat perbedaan persepsi, makna, dan kepentingan. Masyarakat Indonesia yang relasi hubungan antar golongan, etnis, agama dan kelas ekonominya cukup padat sudah tentu pernah terlibat dalam pengalaman relasi konflik dan praktik kekerasan.² Sedangkan Nirwaya *et. al.* menjelaskan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, pada tataran individu maupun kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Ketika kepentingan yang ada saling bertentangan satu sama lain, saat itulah konflik akan terjadi.³ Konflik dapat dipahami dan dikaji dengan menggunakan lima asumsi dasar.

¹ Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*. (New York: St. Martin's Press, 1990).

² Susan Nofri. *Negara Gagal Mengelola Konflik* (Tata Kelola Konflik di Indonesia). (Jakarta: KoPI, 2012). hlm. 4-5

³ Narwaya T.G., Wijaya M., Sudaryono L., *et. al.* *Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2013). hlm. 48

Asumsi pertama menjelaskan bahwa konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia dan manusia dapat berperan mengelola konflik sehingga konflik tidak menimbulkan kekerasan. Asumsi kedua menyatakan bahwa konflik dapat dianalogikan seperti sebuah drama dimana terdapat aktor, panggung (media yang digunakan) dan skenario. Asumsi dasar ketiga menjelaskan bahwa konflik selalu mempunyai 2 sisi, yaitu potensi risiko dan potensi manfaat. Asumsi dasar keempat, konflik dipengaruhi oleh faktor psikologis dan budaya. Sehingga konflik cenderung mengikuti gaya kepribadian dan psikologis seseorang. Asumsi dasar kelima yaitu konflik dapat dianalogikan sebagai kebakaran di hutan yang gundul, dimana setiap kejadian kebakaran tersebut terdapat unsur rumput, pohon kering, api dan angin. Kelima dasar asumsi ini dapat dijadikan dasar dalam menganalisa konflik.⁴

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial individu, konflik akan selalu ada selama dalam interaksi yang dilakukan terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal kepentingan, pendapat, persepsi, sudut pandang dan adanya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh setiap individu atau kelompok. Dalam menganalisa konflik kita dapat mencari siapa aktor yang terlibat, penyebab konflik, dan akselerator yang memicu konflik semakin membesar. Selain itu konflik juga dapat terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Penyebab Konflik

Konflik terjadi dikarenakan ada sebab atau alasan yang mendasari. Wirawan menjelaskan konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁵

⁴ Malik, I. Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian.(Jakarta:Kompas Gramedia, 2017), hlm. 11-13

⁵ Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian. (Jakarta:Salemba Humanika, 2009) hlm.7

1. Sumber yang terbatas

Keterbatasan sumber daya yang tersedia di muka bumi, menimbulkan adanya kompetisi yang terjadi di antara manusia untuk memperoleh sumber daya yang diperlukannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kompetisi yang terjadilah yang sering menyebabkan konflik.

2. Kebutuhan

Kebutuhan salah satu faktor pendorong individu melakukan sesuatu. Kebutuhan setiap individu berbeda satu sama lain dan apabila kebutuhan individu diabaikan atau terhambat dapat memicu konflik terjadi.

3. Perbedaan Tujuan

Menurut Hocker dan Wilmot (1978) dalam Wirawan menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan adanya perbedaan tujuan yang terjadi diantara pihak yang terlibat konflik. Namun, konflik dapat juga terjadi karena adanya perbedaan cara dalam mencapai tujuan yang sama.

4. Karakteristik sistem sosial yang beragam

Karakteristik yang beragam seperti suku, agama, dan ideologi sering menjadi penyebab konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan sering kali karakteristik tersebut dalam kehidupan sehari-hari diikuti dengan pola mengeksklusifkan satu sama lainnya.

5. Pribadi Orang

Kepribadian individu terkadang dapat menjadi penyebab suatu konflik terjadi. Hal ini dikarenakan dalam sifat dan kepribadian setiap individu terdapat karakter yang dapat menimbulkan konflik seperti selalu curiga, berpikiran negatif kepada orang lain, egois, merasa paling benar, tidak dapat mengendalikan emosi, dan ingin menang sendiri. Karakter-karakter tersebut jika tidak dapat dikendalikan oleh setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain sangat mudah untuk menyulut konflik terjadi.

6. Emosi dan Perasaan

Emosi dan perasaan setiap individu berbeda, terkadang dalam berinteraksi terdapat sebagian individu yang melibatkan emosi dan perasaannya. Individu yang dalam berinteraksi terlalu melibatkan emosi dan perasaannya cenderung menjadi tidak rasional (irasional). Hal ini lah yang dapat memicu timbulnya konflik.

7. Budaya konflik dan kekerasan

Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga memasuki abad ke-21 mengalami serangkaian konflik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang terjadi terus-menerus. Konflik yang terjadi secara otomatis dapat mempengaruhi dan merubah pola pikir setiap individu. Perubahan yang terjadi seperti pola pikir kebersamaan menjadi individualitas, primordialisme, rasa nasionalisme yang memudar, terkikisnya nilai-nilai tradisi, dan politisasi agama. Hal tersebut yang turut mengembangkan budaya konflik di Indonesia.

2.1.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda. Resolusi dalam *Webster Dictionary* menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.⁶ Mitchell menyatakan resolusi konflik sebagai proses penyelesaian konflik yang berkonsentrasi pada penyelesaian dalam waktu yang cepat (*short term*), dimana mengubah kondisi yang rumit (konflik) kepada kondisi yang lebih baik dengan segera.⁷ Berbeda dengan Mitchell, Dietrich menjelaskan resolusi konflik sebagai proses penghapusan atau mengakhiri konflik seperti dalam dramaturgi novel kriminal, dimana cerita berakhir dengan konflik yang selalu

⁶ Levine, *Webster Dictionary*, (1998), hlm.3

⁷ Michtell, C. Beyond Resolution: What does conflict transformation actually transform? Peace Research Abstracts. hlm 123-261

dapat diselesaikan. Dalam dramaturgi setiap korban yang mengalami trauma, keluarga korban atau para tersangka yang dinyatakan bersalah dalam tangan penyidik atau pengadilan merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik yang adil dan benar.⁸

Selain itu, Fisher *et.al* menjelaskan resolusi konflik sebagai suatu upaya untuk menangani berbagai sebab konflik dan berusaha membangun suatu hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Lain halnya dengan Fisher, Omoluabi mendefinisikan resolusi konflik sebagai proses komunikasi interpersonal yang digunakan oleh dua pihak yang berkonflik untuk mencapai sebuah titik kesepakatan yang baik serta memuaskan. Menurut Miall *et. al.* resolusi konflik yaitu penghentian dan penyelesaian konflik hingga ke akhirnya. Dimana tidak akan ada lagi situasi penuh dengan kekerasan dan kondisi yang membahayakan. Hal ini dikarenakan adanya proses penyelesaian konflik dan perubahan struktur konfliknya.⁹

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dengan individu atau kelompok lain tanpa adanya paksaan. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan permasalahan mereka secara sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil dalam proses penyelesaiannya.

Dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan pengendalian emosi dan komunikasi yang baik, tak hanya itu kemampuan seperti kemampuan mendengarkan orang lain, kemampuan memahami, serta

⁸ Dietrich, W. *Elicitive conflict transformation and the transrational shift in peace politics.* (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2013) hlm.8

⁹ Miall H., Ramsbotham O., Woodhouse T. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 23

menyampaikan pemikiran atau pendapat secara tepat juga komunikatif diperlukan sehingga maksud dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik dapat tersampaikan. Hal ini dikarenakan konflik pada umumnya melibatkan emosi tingkat tinggi dalam prosesnya.

2.1.3 Transformasi Konflik

Pengertian Transformasi Konflik

Lederach menjelaskan transformasi konflik sebagai suatu *envision* dan respon terhadap pasang surut gelombang dari konflik sosial sebagai kesempatan untuk menciptakan proses perubahan sosial yang konstruktif dimana dapat mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan dalam hubungan serta interaksi sosial yang dilakukan. Menurut Lederach transformasi konflik dapat menjadi suatu cara untuk melihat konflik secara utuh. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat konflik tidak hanya kasus-kasus konflik yang terjadi dipermukaan tetapi juga akar-akar konflik yang menjadi pola berkelanjutan dimana jika tidak diselesaikan akan terjadi kembali. Dalam transformasi konflik Lederach mengungkapkan mengenai konsep yang berkaitan dengan konflik yaitu perubahan.¹⁰

Perubahan menurut Lederach tidak hanya sebagai akibat dari efek atau dampak adanya konflik namun perubahan juga dapat menjadi suatu proyeksi kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Transformasi konflik bukan hanya sebagai alat analisa perubahan yang telah dan sedang terjadi namun menyediakan suatu kerangka perubahan yang diinginkan di masa depan. Dalam menganalisa dan terlibat perubahan, terdapat empat dimensi perubahan. Adapun empat dimensi perubahan tersebut yaitu perubahan personal, perubahan relasional, perubahan struktural, dan

¹⁰ Lederach, John Paul. *The Little Book of Conflict Transformation, Clear Articulation of The Guiding Principles by A Pioneer in The Field*. USA: Goodbooks. hlm 4-6

budaya. Transformasi konflik sebaiknya mempunyai arah pencapaian tujuan besar dalam level dimensi yang berbeda.¹¹

Ramsbotham *et. al.* menyatakan bahwa transformasi konflik merupakan tahap lanjut yang lebih mendalam dari proses resolusi konflik.¹² Mitchell menjelaskan Transformasi konflik berfokus tidak hanya pada proses penyelesaiannya saja namun melihat dampak setelah konflik tersebut terselesaikan. Dalam prosesnya sengaja dibangun pendekatan yang berfokus pada residu konflik, trauma, ketakutan, rasa sakit dan kebencian yang terjadi setelah konflik. Sehingga dalam proses transformasi konflik, penyelesaian yang ada harus dipastikan tidak menyebabkan konflik tersebut dipermasalahkan atau terulang kembali di kemudian hari.¹³

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, transformasi konflik dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian konflik dengan melakukan perubahan yang dapat menciptakan perdamaian. Transformasi konflik tidak hanya berusaha untuk mencegah dan mengakhiri konflik saja namun dimulai sesuatu hal yang baik dan baru. Sehingga konflik tidak akan terulang kembali dikemudian hari.

Karakteristik Transformasi Konflik

Lederach dalam bukunya mengibaratkan transformasi konflik sebagai seorang yang sedang dalam perjalanan yang memiliki kepala, jantung, tangan. Bagian kepala mengacu kepada konsep pandangan seseorang dalam melihat suatu konflik. Bagaimana seseorang berpikir tentang konflik dan bersikap. Selain itu, dalam kepala setiap individu akan menemukan sikap, persepsi dan orientasi yang akan menuntun kepada proses transformasi konflik yang kreatif. Dalam pendekatan transformasi, konflik

¹¹ Lederach, John Paul. *op. cit*, hlm. 8-16

¹² Ramsbotham, Woodhouse, Miall. *Contemporary conflict resolution, The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts (3rd ed.)*.(UK: Polity Press, 2011).

¹³ Michtell, C. *Beyond Resolution: What does conflict transformation actually transform?* Peace Research Abstracts. Hlm 123-261

merupakan sesuatu hal yang normal dan akan terus terjadi secara dinamis dalam hubungan sesama manusia. Seperti jantung dalam tubuh manusia konflik mengalir dari suatu hubungan dan akan kembali pada hubungan. Konflik menciptakan suatu kehidupan dan dalam konflik seharusnya bisa membuat orang lebih memahami satu sama lain. Individu memahami tangan sebagai bagian dari tubuh yang mempunyai kemampuan untuk membangun, menyentuh, merasakan dan membentuk sesuatu. Dalam pendekatan transformasi melihat bagaimana konflik dapat dirubah dari suatu hal yang merusak menjadi suatu hal yang membangun.

Transformasi konflik dalam prosesnya berkaitan erat dengan adanya perubahan. Target perubahan dalam transformasi dilihat dari aspek pribadi, hubungan, struktural, dan budaya. Secara personal, proses transformasi konflik diharapkan dapat meminimalisir efek kerusakan dari konflik sosial yang terjadi dan memaksimalkan potensi individu untuk bangkit menjadi individu yang baik secara psikologis, emosi, intelektual dan spiritual. Dalam hubungan transformasi konflik dapat meminimalisir fungsi komunikasi yang lemah dan memaksimalkan pemahaman dalam komunikasi antar satu sama lain. Secara struktural transformasi konflik dapat memahami akar penyebab dan kondisi sosial yang dapat menimbulkan kekerasan atau konflik. Selain itu diharapkan juga transformasi konflik dapat memberikan mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dari ruang lingkup budaya diharapkan individu dapat mengidentifikasi dan memahami pattern budaya apa saja yang turut berkontribusi dalam membangkitkan ekspresi kekerasan dalam konflik.¹⁴

2.1.4 Toleransi

Toleransi menurut UNESCO adalah rasa hormat, penerimaan, dan apresiasi atas keragaman budaya dunia, berbagai bentuk ekspresi diri, dan

¹⁴ Lederach, John Paul. *The Little Book of Conflict Transformation, Clear Articulation of The Guiding Principles by A Pioneer in The Field*. USA: Goodbooks hlm 8-16

cara-cara menjadi manusia. Hal ini didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, kebebasan berpikir, hati nurani dan keyakinan. Toleransi dapat diwujudkan kerukunan dalam perbedaan. Hal tersebut tidak hanya kewajiban moral juga merupakan persyaratan politik dan hukum. Toleransi merupakan hal yang membuat perdamaian menjadi mungkin, yang dapat mengubah budaya perang dengan budaya perdamaian.¹⁵

Khalikin dan Fathuri mendefinisikan toleransi sebagai kesediaan menghargai, menghormati dan menerima keberadaan umat beragama lain yang diwujudkan dalam sikap, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa ada paksaan. Sikap dan perilaku tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang rukun dan damai demi hidup bersama yang lebih baik di antara umat yang berbeda agama disuatu daerah.¹⁶ Kinloch dalam Casram menjelaskan bahwa toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Hal ini dikarenakan manusia beragama dalam kehidupannya secara sosial tidak bisa menafikan adanya interaksi dengan berbagai kelompok.¹⁷

Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa Toleransi secara etimologis berasal dari kata *tolerare* yang artinya bertahan atau memikul. Toleransi memiliki kata sifat toleran. Kata toleran mempunyai arti menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan keagamaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Toleransi dalam bahasa arab disebut sebagai *tasamuh* yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Sehingga toleransi dapat menunjuk pada adanya kerelaan untuk menerima kenyataan adanya perbedaan antar individu.¹⁸

¹⁵ UNESCO. "Declaration of Principles on Tolerance", dalam <http://www.unesco.org/en/ev.php>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018

¹⁶ Khalikin A., Fathuri (Ed). 2016. Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik. Jakarta [ID]: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. hlm.

¹⁷ Casram. Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. 2016

¹⁸ Marzuki. Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 147-148.

Berdasarkan beberapa penjabaran tersebut toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, menerima, dan menghormati satu sama lain terhadap perbedaan antar individu baik perbedaan ideologi, agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya dalam interaksi sosial yang dilakukan dimana kelompok mayoritas dapat menghargai dan memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas begitu juga sebaliknya.

2.1. 5 Agama

Agama berasal dari istilah religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “religio” dari akar kata “relegare” yang berarti mengikat.¹⁹ Daradjat mendefinisikan agama sebagai proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Glock dan Strak dalam Drajat mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga dimana kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.²⁰

Agama juga diartikan sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut agama. Hal itu terdiri dari simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.²¹

Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Agama pada umumnya berfungsi sebagai jalan penuntun penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup

¹⁹ Akhmad, D. Sosiologi Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002) hlm. 13

²⁰ Daradjat, Zakiyah. Ilmu Jiwa Agama. (Jakarta: Bulan Bintang. 2005) hlm.10

²¹ Ishomuddin. Pengantar Sosiologi Agama. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002) hlm. 29

dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan kelak. Menurut Puspito, fungsi agama bagi manusia meliputi:

- a. Fungsi edukatif, pada dasarnya manusia mempercayakan fungsi edukatif Pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan. Nilai yang diresapkan antara lain yaitu makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab dan tuhan.
- b. Fungsi Penyelamatan, agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat.
- c. Fungsi Pengawasan Sosial, agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Agama juga memberi sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya.
- d. Fungsi Memupuk Persaudaraan, Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercaya bersama.
- e. Fungsi transformatif, agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru.

2.1.6 Identitas

Identitas menurut Hogg yaitu kesadaran diri yang fokus utamanya secara khusus lebih diberikan pada hubungan antar kelompok, atau hubungan antar individu anggota kelompok kecil. Identitas sosial terbentuk oleh internal kelompok dan eksternal. Identitas dibangun berdasarkan asumsi yang ada pada kelompok. Biasanya kelompok sosial membangun identitasnya secara positif. Pembentukan identitas sosial dilakukan untuk melakukan kategorisasi antara siapa saya dan mereka. Dengan demikian maka muncullah kontestasi kelompok untuk membandingkan aspek positif kelompok dengan lain. Aspek positif ini adalah prototype dari internal kelompok.²²

Sehingga Identitas sosial secara umum dipandang sebagai analisa tentang hubungan - hubungan inter group antar kategori sosial dalam skala besar selain itu identitas sosial juga diartikan sebagai proses pembentukan konsepsi kognitif kelompok sosial dan anggota kelompok. Lebih sederhana lagi identitas sosial adalah kesadaran diri secara khusus diberikan kepada hubungan antar kelompok dan hubungan antar individu dalam kelompok. Pembentukan kognitif sosial banyak dipengaruhi oleh pertemuan antara anggota individu dalam kelompok, orientasi peran individu dan partisipasi individu dalam kelompok sosial.

2.1.7 Komunikasi

Pengertian Komunikasi

Komunikasi memiliki tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi (*source*), saluran (*media*), dan penerima informasi (*audience*). Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang

²² Hogg, Michael A. The Social Perspective: intergroup relation. Self-Conception, and Small Group, Small Group Research [Jurnal, Vol 35 No. 3] (Sage Publication 2004).

digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan *audience* adalah per orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi. Selain tiga unsur tersebut, yang terpenting dalam komunikasi adalah aktivitas memaknai informasi dan pemaknaan yang dibuat oleh *audience* terhadap informasi yang diterimanya.²³

Komunikasi merupakan cara yang masuk akal dan bermakna untuk digunakan manusia dalam mengatur dunianya. Akan tetapi, manusia dalam berkomunikasi umumnya selalu mengedepankan ambisinya. Hal ini cenderung merugikan karena ambisi lebih tidak konsisten, sehingga dapat merekayasa akal sehat manusia hanya untuk mengikuti nafsunya. Komunikasi yang diikuti dengan ambisi cenderung bersifat inkonsistensi, emosional, dan sentimental sehingga komunikasi tidak lagi rasional dan menimbulkan banyak salah paham. Komunikasi tersebut umumnya yang menjadi penyebab konflik sosial terjadi baik di lingkungan keluarga, komunitas, masyarakat, negara serta antar negara.²⁴

Komunikasi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik, hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan cara atau proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana setiap pihak memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Negosiasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencari klasifikasi tentang isu atau masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang proses penyelesaiannya. Pada prinsipnya negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan agar diperoleh keputusan atau kebijakan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.²⁵

²³ Bungin, B. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm. 65

²⁴ Severin, J. Warner & Tankard, Jr. W. James. Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa, Terj. Sugeng Heryanto. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2001) hlm. 155

²⁵ Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I.A., Richard S., Sue W. Mengelola konflik,

Selain Negosiasi, cara lain yang dapat dilakukan yaitu mediasi, mediasi yaitu proses perundingan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik (mediator). Mediator berperan sebagai penengah (pihak ketiga) yang bersifat netral atau tidak memihak kedua belah pihak. Mediator membantu proses dialog dalam penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang berkonflik berjalan lancar sehingga diperoleh kesepakatan untuk menyelesaikan konflik.²⁶

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan alat bagi manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Komunikasi dapat menjadi penyebab dan solusi dari konflik. Komunikasi dapat menjadi penyebab konflik jika tidak ada inkonsistensi dalam prakteknya sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman dalam proses komunikasi yang dilakukan. Komunikasi menjadi solusi dari konflik, karena dalam komunikasi terdapat teknik penyelesaian konflik yaitu dengan cara negosiasi dan mediasi.

Ragam Model Komunikasi

Dalam memahami proses komunikasi yang terkadang bersifat kompleks, berkelanjutan dan mengalami perubahan maka diperlukan suatu instrumen yang dapat membantu individu memahami proses komunikasi yang terjadi. Instrumen tersebut dikenal sebagai model komunikasi. Tubbs dan Moss dalam Mugniyah menjelaskan bahwa suatu model diperlukan untuk menganalisis setiap bagian dari suatu proses agar dapat membuat abstraksi dari suatu tindakan atau peristiwa menjadi lebih nyata atau tangible. Model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menjabarkan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana namun tidak menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sehingga suatu model komunikasi itu tidak lengkap dan hanya sebagai alat

Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. (Jakarta: British Council Indonesia 2001) hlm.115

²⁶ Moelino M. A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. hlm. 99

bantu yang dapat menjelaskan hubungan antar elemen atau komponen dalam komunikasi.²⁷

Tubbs dan Moss (1983) serta De Vito (1996) membedakan model komunikasi kedalam tiga tipologi yaitu model komunikasi linier, interaksional dan transaksional. Adapun penjabaran dari tiga tipologi model tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

a. Model Linear

Model ini mengasumsikan bahwa pada komunikasi terdiri atas beberapa elemen kunci diantaranya yaitu sumber atau pengirim pesan (source), pesan (message) dan penerima pesan (receiver). Konsep dalam model ini yaitu seorang pembicara berbicara pada pendengar dan pendengar mendengarkannya. Komunikasi dalam model ini dilakukan searah, kegiatan berbicara dan mendengar merupakan aktivitas yang terpisah dan bahwa penerimalah yang dipengaruhi pembicara. Model ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Model Intraksional

Model ini menekankan bahwa komunikasi yang terjadi berlangsung 2 arah diantara 2 (dua) komunikator. Pembicara dan pendengar secara bergantian melakukan komunikasi. Elemen penting dalam model ini yaitu adanya umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan umpan balik dapat berupa verbal maupun nonverbal. Umpan balik sangat membantu komunikator untuk mengetahui pesan yang disampaikan tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna yang terjadi. Proses umpan balik terjadi setelah pesan diterima buka saat pesan dikirim.

c. Model Transaksional

Model transaksional menggaris bawahi pengiriman dan penerimaan pesan berlangsung secara terus menerus secara simultan. Komunikasi

²⁷ Lubis D.P, Mugniesyah S.S, Purnaningsih N, et. al. Dasar-Dasar Komunikasi.(Bogor: Sains KPM IPB Press, 2010). hlm. 52

²⁸ Lubis D.P, Mugniesyah S.S, Purnaningsih N, et. al. *op. cit.* hlm 80-90

dalam model ini terjadi diantara dua orang atau lebih dan pesan atau pengaruh terjadi secara dua arah. Pihak yang terlibat sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektifnya komunikasi yang terjadi. Dalam model ini, masing-masing pihak membangun kesamaan makna. Pengetahuan dan pengalaman sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi. Model ini memandang, unsur-unsur komunikasi saling ketergantungan (tidak pernah bebas), bahwa masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lainnya (saling mempengaruhi).

Dari tiga tipologi model diatas, masing-masing memiliki sejumlah model komunikasi. Akan tetapi yang akan lebih dibahas yaitu model komunikasi transaksional. Pada model transaksional memiliki 2 macam model komunikasi yaitu model komunikasi Schramm dan model komunikasi konvergensi Kincaid. Adapun penjelasan dari kedua model ini sebagai berikut:

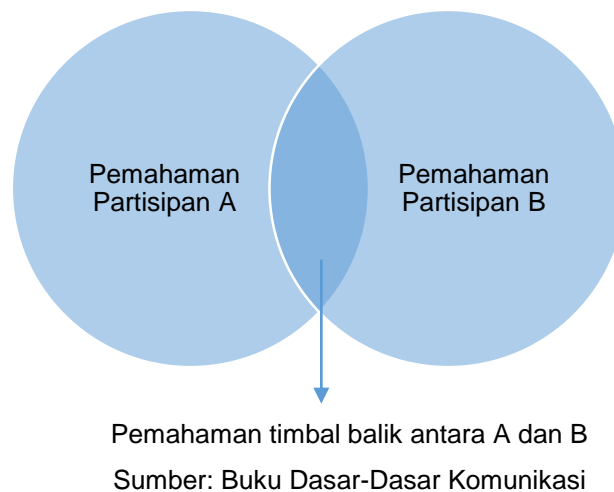
1. Model Komunikasi Schramm

Model komunikasi ini menekankan akan pentingnya umpan balik sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah gangguan. Penerima yang memberikan umpan balik akan menjadi sumber sekaligus mengeliminir kebutuhan untuk suatu perbedaan antara sumber dan penerima. Menurut Schramm proses komunikasi itu tidak berujung pangkal. Pelaku yang terlibat dalam komunikasi itu setara dan menampilkan fungsi yang sama yaitu menyandikan, menerjemahkan dan menginterpretasikan. Fungsi menyandi pesan serupa dengan fungsi mentransmisikan pesan sedangkan fungsi penerjemahan pesan setara dengan fungsi penerimaan.

2. Model Komunikasi Konvergensi Kincaid

Model komunikasi ini menjelaskan komunikasi sebagai proses horizontal antara dua orang atau lebih dalam sebuah social networks. Dalam model ini komunikasi dipandang sebagai proses yang berkesinambungan

dimana antara partisipan terdapat proses saling tukar informasi dalam upaya mencapai sebuah mutual understanding, dengan kata lain masing-masing pihak menciptakan dan saling berbagi informasi untuk mencapai pemahaman timbalbalik. Namun, pihak-pihak ini menyadari meskipun pemahaman timbalbalik itu merupakan fungsi utama komunikasi, pada nyatanya tidak pernah tercapai secara mutlak karena adanya ketidakpastian (*uncertainty*) yang melekat pada pertukaran informasi.



Gambar 1. Model Komunikasi Konvergensi Kincaid dan Schramm

Pemahaman yang tumpang tindih atau timbalbalik ditunjukkan oleh area yang berwarna tebal. Pemahaman timbal balik yaitu suatu proses keputusan bersama yang didasarkan pada ketidakpastian. Kode dan konsep yang dimiliki seseorang untuk memahami tentang sesuatu informasi dipelajari melalui pengalaman. Oleh karena itu, sistem konseptual yang digunakan partisipan untuk memahami hanya dapat didekati oleh partisipan lainnya dengan beberapa keterbatasan berupa kesalahan atau ketidakpastian.

Dalam model ini dimungkinkan adanya hasil yang berlawanan yaitu terjadinya kesalahpahaman, kesalahtafsiran, kekeliruan, dan ketidakpercayaan yang akan mengurangi pemahaman timbal balik dan

membawa pada ketidaksepakatan dan konflik. Sehubungan dengan itu ada empat kombinasi yang dimungkinkan dari pemahaman timbal balik dan kesepakatan yaitu pemahaman timbalbalik dengan kesepakatan, pemahaman timbalbalik dengan ketidaksepakatan, kesalahan pahaman timbalbalik dengan kesepakatan, dan kesalahpahaman timbalbalik dengan ketidakpastian. Model komunikasi ini akan lebih dinamis jika dua faktor penting yaitu pengolahan informasi ketidakpastian yang inheren dalam proses komunikasi dan pemahaman timbal balik sebagai tujuan mendasar komunikasi dipertimbangkan dalam prosesnya.

2.1.8 Rumah Ibadat

Peraturan Pendirian Rumah Ibadat²⁹

Dalam peraturan bersama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri, rumah ibadat didefinisikan sebagai bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluknya masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. berdasarkan definisi tersebut rumah ibadat dapat diartikan sebagai sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat tertentu. Fungsi rumah ibadat disamping tempat melakukan ibadat diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik.

Pada pasal 14 peraturan bersama tersebut, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang diatur dalam undang-undang no 28 tahun 2002. Selain itu pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Adapun persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadat yaitu sebagai berikut:

²⁹ Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 tahun 2006

1. Mengumpulkan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
2. Memperoleh dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Memiliki rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
4. Memiliki rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
5. Apabila persyaratan pada poin satu terpenuhi sedangkan persyaratan pada poin 2 belum terpenuhi maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadah.

Rumah ibadah yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-undang ada enam yaitu masjid termasuk mushola untuk tempat ibadah umat Islam, gereja termasuk kapel untuk tempat ibadah umat Kristiani, pura untuk tempat ibadah umat Hindu, Vihara untuk tempat ibadah umat Budha dan Kelenteng untuk tempat ibadah umat Konghucu. Selain itu pada peraturan bersama ini juga dijelaskan mengenai penyelesaian perselisihan dari pendirian rumah ibadah yang tertulis pada pasal 21 ayat 1 sampai 3 yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Berdasarkan penjabaran diatas, setiap umat beragama yang ingin mendirikan tempat ibadah harus mematuhi aturan yang berlaku, terutama mengenai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Gereja

Gereja dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bangunan atau rumah tempat berdoa atau melakukan upacara agama bagi pemeluk agama kristen.³⁰ Secara etimologi kata Gereja diterjemahkan dari bahasa Yunani *ekklisia* berasal dari kata ek (keluar) dan kalleo (memanggil). Ekklesia umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi sekumpulan orang, baik perkumpulan/perhimpunan secara resmi maupun tidak resmi.³¹ Gereja di Indonesia sudah ada sejak Portugis berkuasa di Nusantara. Adapun periode perkembangan dan perluasan gereja sebagai berikut:³²

1. 1522-1570 : Periode perluasan pertama, periode ini berakhir dengan Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun di Ternate dan Kekuasaan Portugis di Nusantara yang merosot.
2. 1570-1815 : Periode Stagnansi, Pada masa pertama VOC mengalami sedikit perluasan namun tidak begitu berarti.
3. 1815-1870 : Periode mulai didirikan pangkalan-pangkalan baru namun belum terjadi proses kristenisasi secara besar-besaran, kecuali di Minahasa.

³⁰ Moeliono, M.A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta (2003): Depdikbud, hal. 125

³¹ Charles C. Ryrie. Teologi Dasar, Buku 2. Yogyakarta: Yayasan Andi (2000), hal. 184

³² Sihombing S. Bahan Adjar MK. Sejarah Gereja. 2009. STT. HKBP Pematangsiantar.hlm.9

- 4.1870-1950 : Periode didirikannya gereja-gereja suku.
- 5.1950 : Periode penyebaran Injil di Pulau Jawa dan juga di daerah-daerah lain. Pengkristenan penganut-penganut agama suku pada intinya sudah berakhir.

Kruger menjelaskan dalam bukunya, *Gereja di Jawa baru dimulai pada abad ke-19*. Pada zaman VOC memang sudah terdapat beberapa jemaat di daerah pantai, seperti di Jakarta (1619), Semarang (1753), dan Surabaya (1785). Namun, adanya gereja di Jawa hampir 200 tahun lamanya tidak memberikan pengaruh apapun bagi proses penginjilan di Pulau Jawa (1619-1815). Hal ini dikarenakan VOC tidak melakukan kewajibannya untuk mencukupi segala keperluan gereja agar gereja dapat menunaikan tugasnya. Semua dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan politik dan ekonomi pada saat itu.³³ End menjelaskan juga bahwa pada abad ke-19 pekabaran Injil ke Jawa dirintis oleh orang perorangan di kota-kota maupun di pedalaman. Lembaga-lembaga zending (pekabaran injil) barulah mulai bekerja dengan sungguh setelah tahun 1860. Usaha yang dilakukan di daerah Kota tidak banyak berhasil namun pada daerah pedalaman pada tahun 1860-an sudah terdapat banyak orang Kristen di Jawa (ribuan di Jawa Timur dan Tengah serta ratusan di Jawa Barat) berkat orang-orang Jawa sendiri. Badan-badan zending pada masa ini mulai bertindak sebagai wali jemaat Kristen Jawa, hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejawen di dalam jemaat Kristen Jawa.³⁴ Pada umumnya gereja kristen di Indonesia dapat diklasifikasikan kedalam tiga aliran utama yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Protestan dan Gereja Ortodoks.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) merupakan sebuah gereja baru di Indonesia sebagai hasil penyatuan dari GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah dan GKI Jawa Timur. Gereja Kristen Indonesia dapat berdiri melalui proses

³³ Kruger, M. *Sejarah Gereja di Indonesia*. Badan Penerbitan Kristen Djakarta. 1996. Hlm 38-46

³⁴ End, Van den. *Ragi Carita 1*. PT BPK Gunung Mulia. 2001. Hal. 197-210

sejarah yang panjang. Diawali dengan berdirinya GKI Jawa Timur terlebih dahulu pada tahun 1934 di Jawa Timur, lalu pada tanggal 24 Maret 1940 di Jawa Barat didirikan sebuah gereja yang dinamai GKI Jawa Barat dan pada tanggal 8 Agustus 1945 berdiri GKI Jawa Tengah di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 27 Maret 1962 ketiga gereja tersebut memulai upaya kebersamaan dalam mewujudkan penyatuan GKI dalam wadah Sinode Am GKI. Pada tanggal 26 Agustus 1988 setelah melewati perjalanan hampir tiga dekade, ketiga gereja tersebut berhasil mengikrarkan menjadi satu gereja yang diberi nama GKI (Gereja Kristen Indonesia).

Gereja Kristen Indonesia dalam sistem organisasi gereja yang mengikuti Tata aturan GKI menggunakan sistem *presbiterial-sinodal* dengan empat perjenjangan. Sistem perjenjangan dalam struktur organisasi dimulai dari jenjang yang terkecil yaitu Jemaat dan yang paling tinggi adalah Sinode. Jemaat merupakan lingkup yang paling dasar dalam organisasi GKI, umumnya dipimpin oleh Majelis Jemaat. Anggota dari Majelis jemaat terdiri dari semua pejabat-pejabat gerejawi yang meliputi Penatua dan Pendeta. Satu tingkat di atas jemaat terdapat jenjang Klasis, yaitu lingkup yang terdiri dari jemaat-jemaat yang berada di Klasis bersangkutan serta di pimpin oleh Majelis Klasis. Selanjutnya Sinode Wilayah, merupakan gabungan dari klasis-klasis yang berada di sinode wilayah, serta dipimpin oleh Badan Majelis Pekerja Sinode Wilayah (BPMSW). Tingkatan yang paling atas yaitu sinode, meliputi keseluruhan sinode wilayah yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS-GKI).

Awal mula berdirinya GKI di Bogor diawali dengan pendirian Pos PI di Jalan Suryakencana 116 Bogor. Pos PI yang baru ini rutin mengadakan kegiatan kebaktian, persekutuan dan kegiatan-kegiatan gerejawi, sampai pada tanggal 8 Oktober 1967 diselenggarakan Perjamuan Kudus yang pertama yang dilayani oleh Pendeta Rasmindarya (alm). Dalam melengkapi kelengkapan Pos PI dibentuklah pengurus yang terdiri dari JG. Abednego

sebagai Ketua, Arif Samekto sebagai Sekretaris dan Harry Gunawan sebagai Bendahara. Berjalannya waktu Pos ini mengalami pertumbuhan Jemaat yang diberkati. Oleh karena itu dibentuklah komisi-komisi untuk melengkapi kepengurusan, komisi yang dibentuk yaitu Komisi Pemuda, Komisi Anak, Komisi Wanita dan panitia-panitia lainnya untuk melengkapi dan menampung kegiatan-kegiatan yang semakin berkembang.

Pos PI yang semakin berkembang membuat panitia Pos bekerja keras dan berusaha untuk mendewasakan jemaat. Panitia pos kemudian mengajukannya ke Klasis di Jakarta. Pada tanggal 31 Oktober 1968, berlangsunglah Kebaktian Pendewasaan Pos PI menjadi jemaat GKI Jabar yang bernaung dalam lingkungan Klasis Jakarta. Pos PI kemudian disebut sebagai GKI Bogor. Pada tahun 1970 GKI Bogor berpindah lokasi ke Jalan Pengadilan No.13, karena hal ini GKI Bogor saat ini lebih dikenal dengan GKI Pengadilan Bogor.

2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait konflik pembangunan rumah ibadat telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Namun tetap terdapat pembaruan atau pembeda dari penelitian satu dengan penelitian lainnya begitu juga dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang pertama dibaca yaitu Penelitian dari Sinaga M. Sinaga dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Konflik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi Tahun 2013, memperoleh fakta bahwa adanya bentuk pelanggaran kebebasan beragama dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh beberapa oknum. Selain itu, membaca dari hasil penelitian yang dilakukan masih belum adanya sinergitas yang baik antara pemerintah, pihak gereja dan masyarakat sekitar dalam penyelesaian konflik. Sehingga masing-masing pihak yang terlibat masih memiliki sudut pandang yang berbeda atas pembangunan gereja yang dilakukan.

Selain itu, Arifinsyah dengan penelitiannya yang berjudul *The Conflicts of Worship Houses after the Reformation in North Sumatra, Indonesia* menemukan hasil bahwa munculnya konflik rumah ibadat disebabkan oleh dua faktor penting yaitu masalah regulasi rumah ibadat yang kaku dan komunikasi antarbudaya yang tidak menemukan keselarasannya atas fenomena kedatangan berbagai agama dan komunitas dengan etnik yang berbeda di suatu wilayah. Pemetaan dengan pola klasifikasi daerah berdasarkan zona dengan membaginya menjadi zona merah, kuning dan hijau merupakan salah satu upaya untuk mengidentifikasi penyebaran konflik rumah ibadat yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara sehingga pencegahan konflik dan pengelolannya dapat dilaksanakan secara efektif.

Rabitha dalam penelitiannya mengenai Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural Pendirian Vihara Tri Dharma Bandar Lampung, memperoleh hasil bahwa Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 dapat menjadi langkah perencanaan dan pengelolaan konflik rumah ibadah secara konstruktif. Namun, perlu kelihaihan aparat pemerintah dalam menafsirkan aturan yang ada dan mengelola sumber daya manusia terkait. Secara struktural penyelesaian jelas terlihat pada pengorganisasian dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik. Selain itu, secara kultural terlihat pada upaya fasilitatif dari pihak-pihak terkait melalui musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Selanjutnya Ruhana A. S. dalam penelitiannya yang berjudul *Mengurai Benang Kusut Kasus GKI Yasmin: Penelitian Pendahuluan*, bahwa kasus GKI Yasmin adalah kasus perselisihan segitiga antara Pemerintah Kota, GKI dan Warga terkait rencana pendirian gereja yang disebabkan oleh sejumlah hal. Hal-hal itu antara lain terbitnya IMB yang diduga cacat hukum serta pseudo-intoleransi yang berkaitan dengan praktik penyiaran agama yang tidak sewajarnya.

